
Dampak Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018)

Ratih Dewi Nugrahani Rizki

STIE Indonesia Banking School

ratihdnr97@gmail.com

Bani Saad

STIE Indonesia Banking School

bani.saad@ibs.ac.id

Abstract

This study aims to determine the impact of good corporate governance and company size on financial performance on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in period 2016-2018. Indicator used with mechanism of good corporate governance consist of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Independent Commissioners, Institutional Ownership, and Audit Committees and for Financial Performance are measured by CFROA (Cash Flow Return on Asset). The sample in this company amounted to 91 with 35 bank companies that met the research sample criteria. The result showed that the Board of Directors, Board of Commissioners, Independent Commissioners, Institutional Ownership had no effect on Financial Performance, but the Audit Committee and Company Size influenced the Financial Performance of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for period of 2016-2018.

Keywords: *Good Corporate Governance, Financial Performance, CFROA.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2018. Indikator yang digunakan dalam mekanisme *good corporate governance* terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit dan untuk Kinerja Keuangan diukur dengan CFROA (*cash flow return on asset*). Sampel dalam perusahaan ini berjumlah 91 dengan 35 perusahaan bank yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, namun Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2018.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, kinerja keuangan, CFROA.*

1. Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang, banyak perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan performa mereka agar tidak tertindas oleh persaingan global yang semakin ketat. Salah satu performa yang harus mereka tingkatkan adalah masalah keuangan, terutama kinerja keuangan yang berperan penting sebagai kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mengelola dan mengembangkan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan dapat mewujudkan dengan melakukan pengimplementasian tata kelola perusahaan atau *corporate governance* (Addiyah & Chariri, 2014).

Dalam penerapan tata kelola perusahaan juga membutuhkan pihak atau element untuk mengatur dan memonitor implementasi tata kelola perusahaan. Selain pihak yang mengatur dan memonitor implementasi tata kelola perusahaan ukuran perusahaan juga menjadi tolok ukur besar kecilnya perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan investor untuk berinvestasi (Gill & Obradovich, 2012). Penelitian ini menggunakan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau sistem *good corporate governance* (dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan institusional, menggunakan *Cash Flow Return*

on Asset (CFROA) yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba, dan jika membicarakan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan tidak bisa dipisahkan dengan ukuran perusahaan.

Perusahaan perbankan dipilih menjadi objek penelitian karena penelitian ini merupakan penggabungan dari Hendratani et al., (2018) dan Widyastuti (2017) yang menggunakan perbankan sebagai objek penelitian, selain itu perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional, khususnya di Indonesia.

2. Landasan Teori

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan konsep dasar dari *Good Corporate Governance*, dalam mengaitkannya dengan kinerja keuangan dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme atau sistem, karena system *good corporate governance* merupakan prosedur atas hubungan yang jelas antara pihak pengambil keputusan dengan pihak yang penerima keputusan dalam melakukan pengawasan pada sebuah keputusan (Sabrinna, 2010). Teori agensi *good corporate governance* diawali dengan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen pertama kali dikembangkan pada tahun 1976 oleh Jensen dan Meckling yang menyatakan bahwa keagenan timbul karena adanya kontrak antara *principal* (pemilik) dan melibatkan pihak lain atau *agent* (manajemen) untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik.

Selama menjalankan operasional perusahaan, pihak manajemen harus memberikan informasi kepada pemilik modal, namun terkadang informasi yang diberikan pihak manajemen tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya diperusahaan. Pihak manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan untuk membuat laba perusahaan meningkat. Melakukan manipulasi laporan keuangan (*fraud*) dan hal tersebut tentu saja menyebabkan konflik antara pemilik modal dan pihak manajemen. Konflik hubungan antara *principal* dan *agent* seperti ini dapat menimbulkan biaya keagenan atau *agency cost* (Hardikasari, 2011).

Waryanto (2010) membagi biaya keagenan (*agency cost*) menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya Monitoring (*monitoring cost*): biaya yang harus dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh manajer.
- b. Biaya Bonding (*bonding cost*): biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan bahwa manajer tidak akan melakukan hal yang merugikan pemilik.
- c. Biaya Kerugian Residual (*residual loss*): nilai ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat adanya perbedaan kepentingan.

Good Corporate Governance

FCGI atau *Forum for Corporate Governance in Indonesia* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menjelaskan prinsip-prinsip dari *corporate governance* dalam meningkatkan kinerja Bank, yang dipaparkan sebagai berikut:

- a) Transparansi (*Transperency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b) Akuntabilitas (*Accountanbility*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian tata kelola Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d) Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- e) Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agoes & Ardana (2013:106) mengatakan bahwa ada lima alasan mengapa penerapan *corporate governance* memberikan manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu:

- a) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b) Mendapatkan biaya modal yang lebih murah.
- c) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
- f) Praktik *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- g) Para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan system *corporate governance*.

Mekanisme sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ditetapkan. Mekanisme merupakan cara kinerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu. Menurut Bukhori (2012) mekanisme *corporate governance* adalah suatu mekanisme berdasarkan pada prosedur antara pihak-pihak yang ada didalam suatu perusahaan untuk menjalankan tugas dan perannya. Dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme internal yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit.

Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan indikator dan organ perusahaan yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016, 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyebutkan jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi yang tercantum pada Pasal 4, sebagai berikut:

- a) Bank wajib memiliki anggota Dewan Direksi dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- b) Seluruh anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisili di Indonesia.
- c) Dewan Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016, 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyebutkan jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris yang tercantum pada Pasal 23, sebagai berikut:

- a. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi.
- d. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
- e. Dewan Komisaris wajib dipimpin oleh presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyebutkan bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Pasa 24, Ayat 1, menyebutkan bahwa tugas Komisaris Independen adalah untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain.

Kepemilikan Institusional

Menurut Fitriatun, Makhdalena, & Riadi (2018) Kepemilikan Institusional salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, karena dengan adanya kepemilikan oleh Investor Institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan. Adanya Kepemilikan Institusional juga menyebabkan perilaku *agent* lebih terkontrol dengan baik. Tingginya Kepemilikan Institusional akan mendorong aktivitas pengawasan, karena besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional

dalam kebijakan manajemen Hendratani et al., (2018). Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain, seperti perusahaan atau lembaga lain. Tingginya kepemilikan institusional akan mendorong aktivitas pengawasan, karena besarnya pengaruh kepemilikan institusional dalam kebijakan manajemen (Hendratani et al., 2018). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk pengawasan manajemen.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 /POJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 41, Komite Audit harus beranggotakan paling sedikit:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- f. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
- g. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Ukuran Perusahaan

Menurut Bukhori (2012) ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar total aset yang dimiliki dan dikelola perusahaan. Total aset juga mencerminkan hak dan kewajiban serta permodalan bank, semakin besar ukuran perusahaan maka dapat dipastikan pula semakin besar dana yang dikelola perusahaan dan semakin kompleks pula pengelolaannya.

Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan begitu, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan, tentu saja perusahaan harus meningkatkan kinerja mereka.

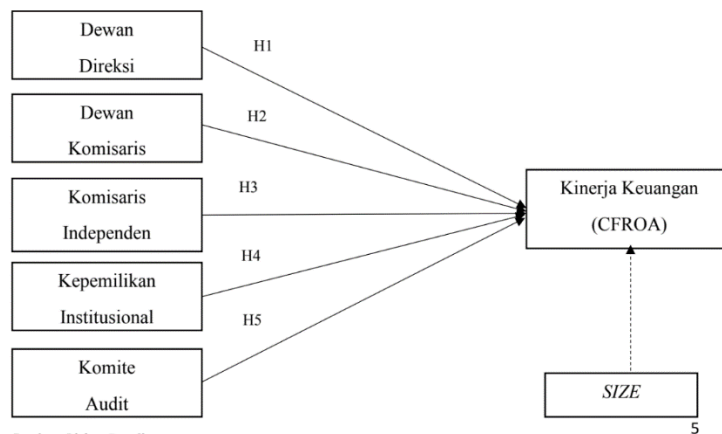
Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan setiap periode yang bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan manajemen serta meningkatkan nilai perusahaan kepada para stakeholder (Pertiwi & Pratama, 2013).

Pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan. Menurut Agoes & Ardana (2013:107), laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang menyajikan kinerja keuangan apa adanya, tidak ada yang disembunyikan, dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan prinsip *corporate governance* yang sudah dibahas sebelumnya, laporan keuangan yang disusun harus mengikuti prinsip transparansi.

Kerangka Penelitian

Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit.



Sumber: Olahan Penulis

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

Menurut Addiyah & Chariri (2014) dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam pelaksanaan

corporate governance yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Jumlah dewan direksi secara logis akan berpengaruh besar terhadap kecepatan pengambilan keputusan. Berkaitan dengan teori agensi, dewan direksi sebagai *principal* memiliki wewenang untuk mengawasi *agent* dan menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendratani et al. (2018) berhasil menemukan adanya pengaruh Dewan Direksi dalam meningkatkan kinerja keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012) menemukan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena semakin meningkatnya Dewan Direksi, akan menimbulkan masalah agensi dan pengawasan menjadi sulit dilakukan.

Dari uraian tersebut, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Ekaningtias (2017), Dewan Komisaris merupakan suatu komite khusus dalam perusahaan, yang bertanggung jawab untuk meneliti segala hal yang berkaitan dengan akuntansi, pengaturan, keuangan, dan pengelolaan perusahaan. Berkaitan dengan teori agensi, menurut Widyastuti (2017) Dewan Komisaris yang lebih besar mampu meningkatkan akses dalam berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang memiliki dampak terhadap kinerja keuangan dan meminimalisir terjadinya *agency cost*. Terkait dengan teori agensi, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi *agent*. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Rahayu (2017) mengatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena memiliki peran dalam pengawasan kinerja perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtias (2017), dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Maka, berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtias (2017), Komisaris Independen menjadi penengah dalam perselisihan atau permasalahan yang terjadi antara manajemen internal dan mengawasi kebijakan manajemen, serta memberikan nasihat kepada para *agent*. Hubungan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan, komisaris independen dapat menjadi *principal* terhadap perusahaan dan menjamin *agent* mengelola perusahaan dengan bersih sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hendratani et al. (2018) mengatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Zulham, Suhendro, & Anita Wijayanti (2018) mengatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Fitriatun et al. (2018), Kepemilikan Institusional merupakan elemen penting dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan karena dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan dan dapat mengontrol perilaku *agent* dengan baik. Kepemilikan institusional yang terstruktur akan memudahkan dalam pengendalian dan akan meningkatkan kinerja keuangan. Berkaitan dengan teori agensi, Investor Institusional akan melakukan pengawasan ketat terhadap dana yang sudah ditanamkan pada perusahaan dan memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan *agent* sehingga memperkecil *agent* dalam berbuat kecurangan agar tidak terjadi *agency cost* dan akan meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016), Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun penelitian yang dilakukan oleh Ekaningtyas (2017) mengatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Ekaningtias (2017), Komite Audit merupakan suatu Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang mana harus bebas dari pengaruh manajemen perusahaan dan memiliki sifat independen, serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam upaya meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja direksi perusahaan. Hubungannya dengan kinerja keuangan, Komite Audit melakukan pengawasan laporan keuangan, supaya laporan keuangan yang dilaporkan *agent* untuk *principal* sesuai dengan yang terjadi sebenarnya dan diharapkan dapat mengurangi *agency cost*.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2017), Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, karena Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas,

tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Atmaja, Riswa, & Tohir (2015) mengatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari pernyataan diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

3. Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data skunder. Keuntungan dalam menggunakan data skunder adalah penghematan waktu dan penghematan biaya dalam memperoleh informasi (Sekaran, 2011:65). Data skunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016-2018.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik sampling atau pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Salah satu teknik dari *non-probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Didapatkan 91 observasi yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2016 –2018	45
Perusahaan Perbankan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel pada periode 2016 – 2018	(10)
Jumlah perusahaan Perbankan yang menjadi sampel penelitian	35
Total Observasi (3 tahun)	105
<i>Outlier</i>	(14)
Total Observasi Penelitian	91

Sumber: data diolah penulis, 2020

Dari tabel 1 yang menjelaskan tentang kriteria sampel penelitian bahwa terdapat 45 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 dan terdapat 10 perusahaan perbankan yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian, sehingga terdapat 35 perusahaan perbankan yang sesuai dengan kriteria. Kemudian terdapat *outlier* sebanyak 14, sehingga diperoleh 91 observasi penelitian.

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (CFROA), sedangkan variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Dewan Direksi (X₁), Dewan Komisaris (X₂), Komisaris Independen (X₃), Kepemilikan Institusional (X₄), dan Komite Audit (X₅). Sedangkan untuk Variabel Kontrol adalah Ukuran perusahaan (*SIZE*).

Tabel 2 Operasional Variabel

Nama Variabel	Alat Ukur	Skala
Kinerja Keuangan (CFROA)	$CFROA = \frac{EBIT+ DEPRECIATION}{ASSET}$	Rasio
Dewan Direksi	Dewan Direksi = \sum Anggota Direksi	Nominal
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris = \sum Anggota Dewan Komisaris	Nominal
Komisaris Independen	Komisaris Independen = $\frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$	Rasio
Kepemilikan Institusional	Kopemilikan Instusional = $\frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}}$	Rasio
Komite Audit	Komite Audit = \sum Anggota Komite Audit	Nominal
Ukuran Perusahaan	$Size_{it} = Ln \text{ Total Asset}$	Rasio

4. Analisis Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan fakta yang memberikan gambaran umum atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median, standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan Eviews 9, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan deskripsi data dari seluruh variabel yang dimasukkan kedalam model penelitian. Dari analisa deskriptif diatas menunjukkan CFROA (cash flow return on asset) menunjukkan rata-

Tabel 3 Analisis Deskriptif

	Maximum	Minimum	Mean	Median	St.Dev
FROA	5,19	0,30	1,99	1,67	1,18
DD	11	3	6,08	5	2,41
DK	9	2	4,50	4	1,80
KI z	80	50	56,54	50	10,89
INST	100	10	73,55	80,33	21,05
KA	9	1	3,63	3	1,23

Sumber: Data Output Eviews 9, di olah Penulis 2020

rata 1,99 dan standar deviasi sebesar 1,18. Untuk variabel Dewan Direksi, dilihat dari tabel 3, komposisi Dewan Direksi di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbanyak berjumlah 11 orang dan terkecil berjumlah 3 orang dan hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 4 yang mengatakan bahwa jumlah minimum Direksi suatu perusahaan perbankan berjumlah 3 (tiga) orang.

Untuk variabel Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbanyak berjumlah 9 orang dan terkecil berjumlah 2 orang. Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 23 dengan Bank wajib memiliki Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Untuk variabel Komisaris Independen di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, proporsi Komisaris Independen terbanyak berjumlah 80% dari Dewan Komisaris dan terkecil berjumlah 50%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 24 yang menyebutkan bahwa pada Bank proporsi Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% dari Dewan Komisaris.

Untuk variabel Kepemilikan Institusional di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kepemilikan Institusional tertinggi sebesar 100% dan terendah sebesar 10% dan rata-rata (mean) Kepemilikan Institusional sebesar 73,55% hal ini berarti Kepemilikan Institusional menguasai sebanyak 73,55% kepemilikan saham dan hanya sebagian kecil dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik dan manajerial.

Untuk variabel Komite Audit di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jumlah anggota Komite Audit terbanyak berjumlah 9 orang dan terkecil berjumlah 1 orang dan hal ini belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 41 dimana Bank wajib memiliki Komite Audit minimal berjumlah 3 (tiga) orang dimana, 1 orang Komisaris, 1 orang pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan, dan 1 orang pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum.

Untuk variabel kontrol Ukuran Perusahaan dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki rata-rata (mean) sebesar 30,73% dengan nilai terbesar 34,34% dan terkecil 22,89%.

Analisis Regresi Data Panel

Dari hasil regresi pada tabel 4, dapat disimpulkan persamaan regresi linear data panel adalah sebagai berikut:

$$CFROA = -5.827476 + 0.053516DD - 0.058848DK + 0.007676KI + 0.002547KINST - 0.120132KA + 0.246944LNSIZE + e$$

Persamaan regresi linear tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- Apabila masing-masing nilai variabel independen Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan dianggap 0 maka tingkat Kinerja Keuangan adalah sebesar -5.827476.
- Nilai koefisien regresi untuk Dewan Direksi sebesar 0.053516, hal ini menunjukkan bahwa Dewan

- Direksi sebesar 1 akan disertai kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 0.053516.
- c. Nilai koefisien regresi untuk Dewan Komisaris sebesar -0.058848, hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris sebesar 1 akan disertai penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0.058848.
 - d. Nilai koefisien untuk Komisaris Independen sebesar 0.007676, hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen sebesar 1 akan disertai kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 0.007676.
 - e. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional sebesar 0.002547, hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional sebesar 1 akan disertai kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 0.002547.
 - f. Nilai koefisien Komite Audit sebesar -0.120132, hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit sebesar 1 akan disertai penurunan Kinerja Keuangan sebesar 0.120132.

Tabel 4 Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: CFROA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/25/19 Time: 01:25
 Sample: 2016 2018
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 36
 Total panel (unbalanced) observations: 91
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.827476	3.112591	-1.872227	0.0647
DD	0.053516	0.052035	1.028457	0.3067
DK	-0.058848	0.079092	-0.744048	0.4589
KI	0.007676	0.005754	1.334081	0.1858
KINST	0.002547	0.007337	0.347194	0.7293
KA	-0.120132	0.054127	-2.219454	0.0292
LNSIZE	0.246944	0.101682	2.428595	0.0173

Sumber: Data Output Eviews 9, di olah Penulis 2020

Nilai Koefisien Ukuran Perusahaan sebesar 0.246944, hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan sebesar 1 disertai kenaikan Kinerja Keuangan sebesar 0.246944.

Koefisien Determinasi

Tabel 5 Koefisien Determinasi

R-squared	0.139873	Mean dependent var	0.431504
Adjusted R-squared	0.078435	S.D. dependent var	0.380542
S.E. of regression	0.364792	Sum squared resid	11.17815
F-statistic	2.276660	Durbin-Watson stat	1.953543
Prob(F-statistic)	0.043806		

Sumber: Data Output Eviews 9, di olah Penulis 2020

Koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. Nilai *Adjusted R-Square* berkisaran antara 0 sampai 1. Nilai *Adjusted R-Square* pada penelitian ini sebesar 0.078435 atau 7.8435%. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan mampu menjelaskan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan hanya sebesar 7.8435% dan sisanya sebesar 92.1565% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.

Uji parsial

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan yang diukur dengan CFROA berpengaruh signifikan atau tidak signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 6 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.827476	3.112591	-1.872227	0.0647
DD	0.053516	0.052035	1.028457	0.3067
DK	-0.058848	0.079092	-0.744048	0.4589
KI	0.007676	0.005754	1.334081	0.1858
KINST	0.002547	0.007337	0.347194	0.7293
KA	-0.120132	0.054127	-2.219454	0.0292
LNSIZE	0.246944	0.101682	2.428595	0.0173

Sumber: Data Output Eviews 9, di olah Penulis 2020

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh bahwa variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0.3067 yang artinya nilai ini > 0.05 dengan arah positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA) ditolak. Perusahaan dengan banyaknya anggota Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang artinya semakin banyak anggota Dewan Direksi maka pengawasan akan menjadi lebih sulit, sehingga menimbulkan permasalahan agensi dari manajemen dan kontrol, juga menimbulkan masalah dalam hal komunikasi dan koordinasi karena anggota Dewan Direksi yang semakin banyak. Dengan adanya Dewan Direksi juga tidak menjamin keefektivan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola perusahaan.
- b. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh bahwa variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0.4589 yang artinya nilai ini > 0.05 dengan arah negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA) ditolak. Perusahaan dengan banyaknya anggota Dewan Komisaris tidak akan menjamin tingkat efektivitas dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen sehingga menimbulkan masalah dalam berkomunikasi dan mengkoordinasi kerja masing-masing anggota Dewan Komisaris itu sendiri sehingga mempersulit dalam menjalankan peran. Kesulitan dalam menjalankan peran juga akan berimbas pada pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan.
- c. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0.1858 yang artinya nilai ini > 0.05 dengan arah positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA) ditolak. Komisaris Independen diukur dengan melihat komposisi anggota Dewan Komisaris, dimana anggota Dewan Komisaris dalam sampel perusahaan sudah cukup tinggi sehingga kurang mempengaruhi Kinerja Keuangan. Komisaris Independen juga hanya bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris, akibatnya kinerja Dewan Komisaris menjadi tidak efektif.
- d. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0.7293 yang artinya nilai ini > 0.05 dengan arah positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA) ditolak. Bahwasanya saat ingin menanamkan dana melalui saham, investor tidak melihat siapa investor institusionalnya melainkan investor hanya melihat manajemen perusahaan tersebut dan besar atau kecilnya nilai perusahaan.
- e. Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh bahwa variabel Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 0.0292 yang artinya nilai ini < 0.05 dengan arah negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (CFROA). Dengan demikian, hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (CFROA) diterima namun signifikan negatif. Bahwa banyak anggota Komite Audit dalam perusahaan yang memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan hasil audit akan menurunkan kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut karena banyaknya informasi yang beredar, seharusnya informasi dapat diterima hanya dari Dewan Komisaris.

5. Kesimpulan dan Saran

Setelah melakukan analisis dan uji hipotesis terhadap mekanisme atau system good corporate governance yang terdiri dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dewan Direksi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- b. Dewan Komisaris tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- c. Komisaris Independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- d. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.
- e. Komite Audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini dapat lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan mekanisme penerapan good corporate governance agar dapat meningkatkan Kinerja Keuangan perusahaan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel lainnya yang tidak digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti, Kepemilikan Manajerial, leverage, dan lainnya agar dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan lebih besar lagi dan memperpanjang periode waktu penelitian karena adjusted R-square cukup rendah yaitu sebesar 7.8435%.
- c. Perusahaan perbankan menjadi fokus utama untuk melakukan penelitian ini, peneliti selanjutnya bisa menggunakan perusahaan lain, seperti farmasi, perdagangan, atau manufaktur. Karena dalam penelitian ini penerapan mekanisme *good corporate governance* di perbankan ternyata rendah.

Daftar Pustaka

- Addiyah, A., & Chariri, A. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2001), 1–15.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2013). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bukhori, I. dan R. (2012). Pengaruh GCG dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Diponegoro of Journal Accounting*.
- Ekaningtias, D. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015.
- Fitriatun, Makhdalena, & Riadi, R. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 S.D 2016).
- Gill, A., & Obradovich, J. D. (2012). *The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms*.
- Hardikasari, E. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. 1–81.
- Hendratani, T. W., Nawasiah, N., & Indriati, T. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Putri, D. S. K. (2016). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan.
- Sabrina, A. I. (2010). Pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap asimetri informasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 1.

-
- Sekaran, U. (2011). *RESEARCH METHODS FOR BUSINESS Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, H., & Rahayu, D. (2017). Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
- Waryanto. (2010). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia.
- Widyastuti, S. K. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). In *Manajemen*.

